

A PERFORMANCE ANALYSIS OF REGIONAL BUDGET OF JAYAWIJAYA REGENCY FROM 2010 TO 2014

Didi Yigibalom²
received.oxy@gmail.com

Ida Ayu Purba Riani³
purbariani@gmail.com

Abstract

This study aims to assess performance of Regional Budget (APBD) which includes revenues, spending/expenditures and financing activities of Jayawijaya Government. The data used was the budgeted and realization of Revenue, Spending/Expenditure and Financing activities of Jayawijaya regency from 2010 to 2014. The analysis techniques used was a qualitative approach through various financial ratios. To calculate revenues performance this study employed Variant Analysis (differences of) Budget Revenue, Revenue Growth, Degree of Independence of the region, Regional Reliance to the central government, Degree of Decentralization, Local Tax Effectiveness and Overlay analysis to measure performance of the generated income. Meanwhile to measure expenditure used Variant Analysis (difference) Budgeted Expenditure, Growth of Regional Expenditure, Synchronization of Governmental Spending, Spending Effectiveness and Overlay analysis to measure overall spending/expenditures performance.

Following the analysed data, the study obtained following results: 1) Jayawijaya's revenue performance during 2010 to 2014 based on the overlay analysis was not good. The main caused was due to low degree of the region financial independence, high degree of fiscal dependence for external funding as well as the low degree of fiscal decentralization, 2) Spending/Expenditure Performance of Jayawijaya from 2010 to 2014 was good. This was because of the increasing growth of Jayawijaya's spending/expenditure and the effectiveness of spending/expenditure in Jayawijaya.

Keywords: Budget, Revenue, Spending/ Expenditure, Regional Budget Performance

PENDAHULUAN

Pemerintah daerah sebagai pihak yang diserahi tugas untuk menjalankan roda pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban

² Alumni Mahasiswa Magister Keuangan Daerah Universitas Cenderawasih

³ Staf Dosen Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Cenderawasih

keuangan daerahnya untuk dinilai apakah ia berhasil menjalankan tugasnya dengan baik atau tidak. Salah satu alat untuk menganalisis kinerja Pemda dalam mengelola keuangan daerahnya adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap APBD yang telah dilaksanakan.

Penggunaan analisis rasio pada sektor publik, khususnya terhadap APBD dan realisasinya belum banyak dilakukan sehingga secara teori belum ada kesepakatan secara bulat mengenai nama dan kaidah peraturannya. Namun, analisis rasio terhadap realisasi APBD harus dilakukan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah. Di samping meningkatkan kuantitas pengelolaan keuangan daerah, analisis rasio terhadap realisasi APBD juga dapat digunakan sebagai alat untuk menilai efektivitas otonomi daerah sebab kebijakan ini yang memberikan keleluasaan bagi Pemerintah daerah untuk mengelola keuangan daerahnya seharusnya bisa meningkatkan kinerja keuangan daerah yang bersangkutan.

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, kinerja pemerinah sangat penting untuk dilihat dan diukur. Keberhasilan suatu pemerintah di era otonomi daerah dapat dilihat dari berbagai ukuran kinerja yang telah dicapainya. Pengelolaan anggaran berdasarkan kinerja ini memberikan gambaran yang lebih khusus terkait dengan kemampuan suatu daerah untuk selalu menggali potensi daerah guna meningkatkan anggaran pendapatan yang akan berdampak pada kemampuan pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan kegiatan pembangunan daerah. Dalam anggaran berbasis kinerja secara struktur meliputi anggaran pendapatan, anggaran belanja dan pembiayaan. Penekanan pada belanja daerah menjadi titik perhatian terutama sisi belanja membutuhkan kinerja yang lebih baik, transparan dan tepat sasaran.

Menyimak uraian di atas, Kabupaten Jayawijaya merupakan salah satu daerah yang berada di Provinsi Papua yang memiliki kewenangan

dan tanggungjawab melaksanakan roda pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik yang diikuti dengan perimbangan keuangan yang tercermin dalam APBD sebagai instrumen pelaksanaan program-program, fungsi dan urusan pemerintahan berdasarkan asas dan tujuan otonomi daerah sesuai potensi, kondisi dan kebutuhan daerah.

Realisasi Perkembangan realisasi Pendapatan dan Belanja Kabupaten Jayawijaya selama periode 2010-2014 cenderung mengalami peningkatan. Realisasi Pendapatan daerah tahun 2010 tercatat sebesar Rp 653,96 milyar naik menjadi Rp 1.067 trilyun di Tahun 2014, sedangkan realisasi belanja tahun 2010 tercatat sebesar Rp 618,77 milyar yang meningkat menjadi Rp 964,54 milyar di tahun 2014. Dana Perimbangan masih mendominasi penerimaan daerah dibandingkan dengan PAD. Hal ini mengindikasikan masih tingginya ketergantungan fiskal Pemerintah Daerah Kabupaten Jayawijaya terhadap Pemerintah Pusat selama kurun waktu 2010-2014 kendati paket otonomi daerah telah digulirkan. Pada sisi belanja kebutuhan belanja daerah terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, hal ini merupakan dampak dari kewenangan otonomi daerah dimana pemerintah daerah secara aktif dan lebih leluasa melakukan pembiayaan dalam upaya pengembangan segala bentuk aktifitas program-program pembangunan di daerah.

Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini ingin menganalisis bagaimana kinerja pendapatan dan belanja daerah dengan melihat perkembangan atau pertumbuhan pendapatan daerah selama tahun buku 2010-2014, kemandirian daerah, ketergantungan daerah, derajat desentralisasi fiskal, efektivitas, pertumbuhan belanja, keserasian belanja serta efektivitas belanja dalam mengelola keuangan daerah pada Kabupaten Jayawijaya.

METODE PENELITIAN

Kajian ini dilakukan di Kabupaten Jayawijaya dan data yang digunakan adalah data sekunder berupa Realisasi Pendapatan dan

Belanja Kabupaten Jayawijaya yang bersumber dari LRA Kabupaten Jayawijaya tahun 2010-2014. Teknik analisa data yang digunakan adalah analisa kuantitatif, yaitu data atau informasi berbentuk angka-angka yang dikumpulkan kemudian dianalisis dan ditarik kesimpulan. Adapun alat analisis yang akan digunakan dalam kajian ini adalah:

1. Analisis Pendapatan

Analisis Varians Anggaran Pendapatan

Analisis Varians anggaran pendapatan dilakukan dengan cara menghitung selisih antara realisasi pendapatan dengan yang di anggarakan. Biasanya selisih anggaran sudah di informasikan dalam laporan realisasi anggaran yang sudah disajikan oleh pemerintah daerah. Informasi selisih anggaran tersebut sangat membantu pengguna laporan dalam memahami dan menganalisis kinerja pendapatan.

Rasio Pertumbuhan Pendapatan

Untuk mengetahui tingkat pertumbuhan pendapatan, dilakukan dengan menggunakan rumus berikut ini:

$$\text{Pertumbuhan PAD Tahun } t = \frac{\text{PAD Tahun } t - \text{PAD Tahun } t - 1}{\text{PAD Tahun } t - 1} \times 100\%$$

Sumber : Tagel Wirasa (2004 : 30)

2. Analisis Rasio Keuangan

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Tingkat Kemandirian Keuangan daerah adalah ukuran yang menunjukkan kemampuan keuangan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat, yang diukur dengan rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap jumlah bantuan pemerintah pusat dan pinjaman.

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Bantuan Pem. Pusat \backslash Provinsi dan Pinjaman}} \times 100\%$$

Sumber: Mahmudi, (2007, 128)

Kriteria untuk menetapkan kemandirian keuangan daerah dapat di kategorikan seperti Tabel 1 berikut:

Tabel 1
Kriteri Penilaian Kemandirian Keuangan Daerah

Prosentase PAD terhadap Dana Perimbangan	Kemandirian Keuangan Daerah
0,00 – 10,00	Sangat Kurang
10,01 – 20,00	Kurang
20,01 – 30,00	Sedang
30,01 – 40,00	Cukup
40,01 – 50,00	Baik
>50,00	Sangat Baik

Sumber: Tim Litbang Depdagri – Fisipol UGM, 1991

Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Tingkat Ketergantungan Daerah adalah ukuran tingkat kemampuan daerah dalam membiayai aktifitas pembangunan daerah melalui optimalisasi PAD, yang diukur dengan rasio antara PAD dengan total penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tanpa subsidi (Dana Perimbangan). Tingkat Ketergantungan Daerah diukur dengan Formulasi sebagai berikut:

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Total Pendapatan Transfer}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Sumber: Mahmudi, (2007, 126)

Kriteria untuk menetapkan ketergantungan keuangan daerah dapat dikategorikan seperti Tabel 2 berikut:

Tabel 2
Kriteri Penilaian Ketergantungan Keuangan Daerah

Prosentase Belanja Transfer / Total Penerimaan APBD	Ketergantungan Keuangan Daerah
0,00 – 10,00	Sangat Rendah
10,01 – 20,00	Rendah

Prosentase Belanja Transfer / Total Penerimaan APBD	Ketertanggung Keuangan Daerah
20,01 – 30,00	Sedang
30,01 – 40,00	Cukup
40,01 – 50,00	Tinggi
>50,00	Sangat Tinggi

Sumber: Tim Litbang Depdagri–Fisipol UGM, 1991

Rasio Desentralisasi Fiskal

Tingkat Desentralisasi Fiskal adalah ukuran untuk menunjukkan tingkat kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan. Tingkat desentralisasi fiskal dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan rasio PAD terhadap total penerimaan daerah.

Tingkat Desentralisasi Fiskal diukur dengan formula untuk mengukur tingkat Desentralisasi Fiskal:

$$\text{Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal} = \frac{\text{Total Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Penerimaan APBD}} \times 100\%$$

Sumber: Mahmudi, (2007, 126)

Kriteria untuk menetapkan Tingkat Desentralisasi daerah dapat dikategorikan seperti Tabel 3 berikut:

Tabel 3
Kriteria Penilaian Tingkat Desentralisasi Fiskal

Prosentase PAD terhadap TPD	Tingkat Desentralisasi Fiskal
0,00 – 10,00	Sangat kurang
10,01 – 20,00	Kurang
20,01 – 30,00	Sedang
30,01 – 40,00	Cukup
40,01 – 50,00	Baik
>50,00	Sangat baik

Sumber: Tim Litbang Depdagri – Fisipol UGM, 1991

Rasio efektivitas

Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah (Abdul Halim, 2007:234). Rasio efektivitas dapat diukur dengan formula untuk mengukur tingkat Efektivitas:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Sumber: Mahmudi, (2007, 128/129)

Adapun kriteria untuk menetapkan Efektivitas pengelolaan keuangan daerah seperti Tabel 4 berikut ini:

Tabel 4
Kriteria Penilaian Efektifitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Prosentase Kinerja Keuangan	Kriteri
Diatas 100%	Sangat efektif
90 – 100%	Efektif
80 – 90%	Cukup Efektif
60 – 80%	Kurang Efektif
Kurang dari 60%	Tidak Efektif

Sumber: Depdagri, Kepmendagri No.690.900.327 Tahun 1996

3. Analisis Keserasian Belanja

Rasio keserasian belanja menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja aparatur daerah dan belanja pelayanan publik secara optimal (Halim, 2007:235). Semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan untuk belanja aparatur daerah berarti persentase belanja investasi (belanja pelayanan publik) yang digunakan untuk menyediakan sarana prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil rasio keserasian diformulasikan sebagai berikut:

Rasio Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Terhadap Total Belanja Daerah

$$\text{Rasio Belanja Tidak Langsung} = \frac{\text{Total Belanja Tidak Langsung}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Belanja Langsung} = \frac{\text{Total Belanja Langsung}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Sumber : Tim Litbang Depdagri (dalam Dasril Munir: 2004)

Tabel 5
Kriteria Penilaian Keserasian Belanja

Rasio Keserasian Belanja (%)	Keserasian Belanja Keuangan Daerah Otonom
> 80 – 100	Sangat Serasi
> 60 – 80	Serasi
> 40 – 60	Cukup Serasi
> 20 – 40	Kurang Serasi
0 – 20	Tidak Serasi

Sumber : Mahsun Moh, 2006

Rasio Efektivitas Belanja

Untuk menghitung tingkat efektivitas Belanja daerah dapat diformulasikan sebagai berikut :

$$\text{Rasio Eektivitas Belanja} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Sumber: Mahmudi (2007, 152)

Adapun kriteria untuk penilaian efektifitas ditampilakamp ada table berikut ini:

Table 6
Kriteria Penilaian Efektivitas Belanja Daerah

PERSENTASE	KRITERIA
Diatas 100 %	Sangat efektif
90 – 100 %	Efektif
80 – 90 %	Cukup Efektif
60 – 80 %	Kurang Efektif
≤ 60 %	Tidak Efektif

Sumber : Tim Litbang Depdagri – Fisipol UGM, 1991

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Kinerja Pendapatan

Analisis Varians

Berdasarkan perhitungan varians pendapatan terlihat bahwa kinerja Pemerintah Kabupaten Jayawijaya menunjukkan kinerja cukup baik. Hal tersebut tercermin pada realisasi pendapatan tahun 2010 - 2014 telah melebihi atau melampaui yang ditargetkan, walaupun ditahun 2011 dan 2012 terjadi selisih kurang atau penerimaan anggaran pendapatan Kabupaten Jayawijaya kurang dari anggaran yang ditargetkan.

Tabel 7
Analisis Varian Anggaran Pendapatan Kabupaten Jayawijaya
Tahun 2010 - 2014

Tahun Anggaran	Anggaran Pendapatan	Realisasi Pendapatan	Varian Anggaran Pendapatan
2010	648.478.844.831	653.964.208.233	5.485.363.402
2011	725.400.568.486	720.823.592.660	-4.576.975.826
2012	701.152.218.689	686.830.542.010	-14.321.676.678
2013	966.689.844.387	970.964.270.874	4.274.426.487
2014	1.063.992.100.488	1.067.154.645.682	3.162.545.194

Sumber : Realisasi APBD Kabupaten Jayawijaya: Data Diolah, 2015

Analisis Pertumbuhan Pendapatan

Pendapatan daerah Kabupaten Jayawijaya secara umum mengalami kenaikan dari tahun 2010 sampai pada tahun 2014. Peningkatan secara

dratis terutama terjadi selama dua tahun terakhir yaitu pada tahun 2013 dan tahun 2014. Dimana Pendapatan daerah meningkat pada tahun 2013 dari persentase 8,70% menjadi 10,67% di tahun 2014. Kenaikan persentase pertumbuhan tersebut terjadi seiring dengan kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah yang cenderung meningkat selama periode anggaran tersebut. Tren anggaran pendapatan daerah berkembang cukup lambat dengan rata-rata 6,18% pertahunnya. Walaupun demikian Pemerintah Daerah Kabupaten Jayawijaya telah berupaya dengan melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber PAD yang tercermin dari adanya peningkatan realisasi pos-pos pendapatan daerah seperti Pendapatan Pajak, Pendapatan Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Tabel 8
Rasio Perkembangan Rencana dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Jayawijaya, 2010-2014

Tahun	Rencana, Realisasi PAD dan total Pendapatan			Pertumbuhan (%)
	Rencana	Realisasi	Tatal Pendapatan	
2010	22.760.710.000	22.327.584.130	653.964.208.233	-
2011	23.420.552.787	24.065.487.724	720.823.592.660	7.20 %
2012	28.057.560.211	22.316.934.446	686.830.542.010	6.86 %
2013	28.256.362.190	30.295.146.909	970.964.270.874	8,70 %
2014	40.146.646.000	62.533.965.367	1.067.154.645.682	10,67 %
Rata - rata				6,18 %

Sumber : Realisasi APBD Kabupaten Jayawijaya: Data Diolah, 2015

2. Analisis Rasio Keuangan

Rasio Kemandirian

Rasio kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah

membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Kemandirian ini berarti tidak tergantung terhadap sumber dana eksternal. Semakin tinggi rasio kemandirian mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan pada bantuan pihak external (terutama pemerintah pusat dan provinsi) semakin berkurang, demikian pula sebaliknya. Rasio kemandirian juga menggambarkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi rasio kemandirian, semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama PAD yang berarti menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang semakin tinggi.

Tabel 9
Perhitungan Kemandirian Keuangan Tahun 2010-2014

Tahun	PAD	Bantuan Pemerintah Pusat/Provinsi+Pinjaman	Rasio Kemandirina(%)
2010	22.327.584.130	631.636.623.103	3,53 %
2011	24.065.487.724	696.758.104.936	3,45 %
2012	22.316.934.446	664.513.607.564	3,35 %
2013	30.295.146.909	940.669.123.965	3,22 %
2014	62.533.965.367	1.004.620.680.315	6,22 %
Rata-rata			3,95 %

Sumber : Realisasi APBD Kabupaten Jayawijaya: Data Diolah, 2015

Dari tabel perhitungan diatas, dapat dilihat bahwa dari rasio persentase pada tahun 2010-2014 kemandirian daerah cenderung mengalami penurunan, kecuali tahun 2014 persentase kemandirian keuangan mengalami kenaikan sebesar 6%. Kemandirian keuangan Pemerintah Kabupaten Jayawijaya pada tahun 2010 adalah 3%. Dimana realisasi PAD hanya dapat memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah sebesar 3%, demikian juga pada tahun 2011-2013 rata-rata kemandirian tetap pada posisi 3% seperti tahun sebelumnya. Kinerja pemerintah Kabupaten Jayawijaya dari segi kemandirian keuangan, tetap belum tercapai selama 5 tahun periode penilaian. Tetapi apabila dilihat dari trennya persentase rasio kemandirian keuangan daerah tertinggi

ditunjukkan pada tahun 2014 yaitu 6%, ini artinya bahwa Pemerintah Kabupaten Jayawijaya masih belum mandiri, karena dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat masih tergantung pada bantuan pemerintah pusat/ Provinsi dan lain-lain pendapatan yang sah.

Secara umum kinerja kemandirian daerah Kabupaten Jayawijaya dilihat dari rata-rata rasio berdasarkan Kriteria penilaian keuangan yang dikeluarkan Tim Litbang Depdagri-Fisipol UGM, 1991 dapat dikatakan kemandirian "**Sangat Kurang**". Untuk itu diperlukan usaha pemerintah Kabupaten Jayawijaya yang lebih besar dalam hal melakukan intensifikasi dan ekstesifikasi sumber-sumber PAD untuk mengurangi ketergantungan atas sumber dana eksternal serta meminta kewenangan untuk mengelolah sumber-sumber pendapatan lain yang sampai saat ini masih dikelola oleh pemerintah pusat dan provinsi.

Rasio Ketergantungan Daerah

Semakin tinggi rasio ketergantungan ini semakin besar pula tingkat ketergantungan pemda pada pemerintah pusat maupun provinsi. Dana dari pihak eksternal yang dimaksud adalah dana perimbangan atau dan transfer dari pemerintah pusat maupun provinsi, yang diantaranya berupa dana bagi hasil pajak, DAU, DAK, dsb yang termasuk dana dari pemerintah pusat maupun propinsi. Pengertian dari dana perimbangan sendiri atau menurut UU terbaru disebut dengan dan transfer adalah dana yang bersumber dari penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Tabel 10
Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Tahun 2010 – 2014

Tahun	Total Pendapatan Daerah	Pendapatan Transfer	Rasio Ketergantungan (%)
2010	653.964.208.233	631.636.623.103	96,58 %
2011	720.823.592.660	696.758.104.936	96,66 %
2012	686.830.542.010	664.513.607.564	96,75 %
2013	970.964.270.874	940.669.123.965	96,87 %
2014	1.067.154.645.682	1.004.620.680.315	94,14 %
Rata-rata			96,20 %

Sumber : Realisasi APBD Kabupaten Jayawijaya: Data Diolah, 2015

Rara-rata ketergantungan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Jayawijaya selama periode 2010-2014 mencapai 96,20%. Tingkat ketergantungan keuangan tertinggi terjadi pada tahun anggaran 2010-2013 dengan nilai persentase sebesar 96%, kemudian pada tahun 2014 ketergantungan kembali mengalami penurunan dengan persentase 94,14% dari tahun-tahun sebelumnya.

Dari tahun 2010-2014 pendapatan transfer yang mendominasi adalah DAU (Dana Alokasi Umum) dimana memang dana ini adalah dana yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Melihat dari analisis rasio ketergantungan, Pemerintah Kabupaten Jayawijaya dapat dikatakan masih tergantung dengan pihak eksternal, karena dilihat prosentase kontribusi pendapatan transfer mendominasi total pendapatan, semua persentasenya menunjukkan lebih dari setengah atau 50%. Namun dilihat dari trennya, pada satu tahun terakhir telah mengalami perbaikan ketergantungan terhadap pendapatan transfer sudah menurun.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa ketergantungan pemerintah kabupaten jayawijaya selama perioden anggaran 2010-2014 berdasarkan kriteria penilaian ketergantungan yang dikeluarkan oleh Tim

Litbang Depdagri-Fisipol UGM, 1991, dinilai “**Sangat Tinggi**” dengan rata-rata persentase 94,14%.

Rasio Derajat Desentralisasi

Derajat Desentralisasi menyatakan besarnya kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah. Semakin tinggi kontribusi PAD maka semakin tinggi kemampuan daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi. PAD yang dipandang sebagai elemen pendapatan selaku indikator keberhasilan desentralisasi pada pemerintah daerah, sudah selayaknya kalau kontribusinya terhadap pendapatan besar. Kontribusi PAD yang tinggi terhadap total pendapatan daerah ditunjukkan dengan persentase yang tinggi.

Tabel 11
Perhitungan Derajat Desentralisasi Kabupaten Jayawijaya
Tahun 2010 – 2014

Tahun	PAD	Total Pendapatan Daerah	Rasio Derajat Desentralisasi(%)
2010	22.327.584.130	653.964.208.233	3,41 %
2011	24.065.487.724	720.823.592.660	3,33 %
2012	22.316.934.446	686.830.542.010	3,32 %
2013	30.295.146.909	970.964.270.874	3,12 %
2014	62.533.965.367	1.067.154.645.682	5,85 %
Rata-Rata			3,81 %

Sumber : Realisasi APBD Kabupaten Jayawijaya: Data Diolah, 2015

Dari tabel perhitungan diatas, terlihat bahwa desentralisasi fiscal atau persentase kontribusi PAD terhadap total pendapatan yaitu sebesar 5,85%, berdasarkan Kriteria Penilaian Tingkat Desentralisasi Fiskal yang dikeluarkan oleh Tim Litbang Depdagri-Fisipol UGM, 1991 ini berarti kemampuan pemerintah dalam menyelenggarakan desentralisasi selama periode ini adalah “ **Sangat Kurang**” karena kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah Kabupaten Jayawijaya masih kurang atau dengan kata lain persentase pendapatan transfer masih mendominasi total penerimaan daerah. Pada tahun 2014 tingkat

desentralisasi Kabupaten Jayawijaya terjadi kenaikan, dimana persentase PAD terlihat naik yang juga diiringi oleh kenaikan total Pendapatan Daerah. Pada tahun ini tingkat desentralisasi mengalami kenaikan yang drastis dengan angka 5,85% ini artinya kemampuan desentralisasi meningkat.

Secara umum dapat dikatakan derajat desentralisasi Kabupaten Jayawijaya dilihat dari rata-rata yaitu 3,81% berdasarkan Kriteria Penilaian Tingkat Desentralisasi Fiskal yang dikeluarkan oleh Tim Litbang Depdagri-Fisipol UGM, 1991 “**Sangat Kurang**”.

Sebenarnya rasio desentralisasi ini mendukung rasio kemandirian, hanya saja di sini kita dapat lebih mengetahui ukuran sebenarnya seberapa besar PAD memberikan kontribusi pada total pendapatan daerah. Untuk itu kedepannya Pemerintah Kabupaten Jayawijaya harus lebih berupaya untuk meningkatkan PAD nya dengan melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber penerimaan PAD dengan menggali baru ataupun dengan mengembangkan potensi-potensi ril yang sudah ada.

Efektivitas Pajak Daerah

Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Menurut rasio ini pajak daerah dianggap sangat efektif apabila persentasenya mencapai angka 1 atau 100%.

Tabel 12
Perhitungan Efektivitas Pajak Daerah Kabupaten Jayawijaya
Tahun 2010 – 2014

Tahun	Pajak Daerah		Rasio Efektivitas(%)
	Rencana	Realisasi	
2010	3.079.903.000	1.837.844.291	59,67
2011	2.364.754.797	2.644.844.681	111,84

Tahun	Pajak Daerah		Rasio Efektivitas(%)
	Rencana	Realisasi	
2012	4.001.449.632	3.584.793.761	89,58
2013	3.985.579.171	6.487.545.764	162,77
2014	4.435.000.000	11.133.886.935	251,04
Rata-Rata			134,98

Sumber : Realisasi APBD Kabupaten Jayawijaya: Data Diolah, 2015

Dari tabel perhitungan di atas Efektivitas pajak daerah mencapai puncaknya pada tahun 2014, di mana pada periode penelitian ini efektivitasnya cenderung mengalami kenaikan, kecuali pada tahun 2010 dan tahun 2012 yang mengalami penurunan setelah tahun 2011. Pada tahun 2010 pajak daerah terealisasi sebesar 59,67% kemudian meningkat pada tahun 2011 pada angka 111,84% dikarenakan adanya kenaikan dalam realisasi perolehan dan target pajak daerah, jadi kinerja Pemerintah Kabupaten Jayawijaya pada tahun ini berkembang, karena pencapaian target lebih tinggi pada anggaran yang direncanakan. Pada tahun 2012 rasio efektivitas pajak daerah mengalami penurunan dibawah 100% dengan persentase 89,84%, karena kemampuan Pemerintah Kabupaten Jayawijaya dalam merealisasikan pajak menurun. Pada tahun 2013 dan tahun 2014 rasionya mengalami kenaikan dan semakin tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya bahkan kenaikannya drastis yaitu mencapai angka 251%, sehingga secara umum kinerja efektivitas Pajak daerah Pemerintah Kabupaten Jayawijaya berdasarkan criteria penilaian efektivitas pajak daerah yang dikeluarkan oleh Depdagri, Kepmendagri No.690.900.327 Tahun 1996, kinerja Pemerintah Kabupaten Jayawijaya dikatakan “**Sangat Efektif**”.

Dengan demikian diharapkan Pemerintah Kabupaten Jayawijaya dapat mempertahankan atau terus berusaha meningkatkan keefektifan di bidang perolehan pajak daerah. Usaha untuk mempertahankan keefektifan tersebut dapat dilakukan dengan mengoptimalkan pemungutan, selain itu juga mengoptimalkan pengelolaan, agar keduanya dapat berjalan seperti apa yang direncanakan.

Analisis overlay Pendapatan

Analisis ini digunakan untuk mengkomparasi dan mengukur skor kinerja berdasarkan rasio-rasio pendapatan yang telah diukur sebelumnya. Skor ditetapkan berdasarkan penjumlahan tanda (+) dan (-) dari masing-masing indikator rasio yang telah diukur dahulu.

Jika skor kinerja bertanda (+) berarti kinerja pendapatan dikatakan baik. Sebaliknya jika skor kinerja bertanda (-) dapat dikatakan kinerja Pendapatan tidak baik.

Tabel 13
Analisis Kinerja Pendapatan Kabupaten Jayawijaya Tahun 2010 – 2014 Berdasarkan Analisis Overlay

Uraian								
Tahun Anggaran	Analisis Varians	Analisis Pertumbuhan	Analisis Kemandirian	Analisis Ketergantungan	Analisi Desentralisasi	Analisis Efektivitas	Skor	Kriteria Kinerja
2010	+		---	---	---	--	-11	Tidak Baik
2011	-	+	---	---	---	++	-7	Tidak Baik
2012	-	+	---	---	---	0	-9	Tidak Baik
2013	+	+	---	---	---	++	-5	Tidak Baik
2014	+	+	---	---	---	++	-5	Tidak Baik

Sumber : Realisasi APBD Kabupaten Jayawijaya: Data Diolah, 2015

Dari analisis tabel diatas, kinerja pendapatan daerah Kabupaten Jayawijaya sepanjang tahun 2010 – 2014 berdasarkan analisis overlay dapat dikatakan “**Tidak Baik**”. Hasil penelitian ini tidak sama atau dengan kata lain menolak hipotesa sementara sebelumnya yang menyatakan, kinerja pendapatan daerah Kabupaten Jayawijaya dikategorikan cukup baik.

Adapun faktor permasalahan yang dihadapi Pemerintah Daerah Kabupaten Jayawijaya setiap tahun adalah faktor kemandirian keuangan daerahnya yang dikategorikan masih sangat kurang, faktor ketergantungan fiskal daerahnya yang digolongkan masih sangat tinggi terhadap dana eksternal dan permasalahan selanjutnya adalah faktor derajat desentralisasi fiskal daerah yang dikategorikan masih sangat kurang.

3. Analisis Kinerja Belanja

Analisis Varian Belanja

Analisis Varian Belanja digunakan untuk mengukur perbedaan antara belanja yang dianggarkan dan realisasi belanja yang telah dimanfaatkan oleh Pemerintah termasuk Pemerintah Kabupaten Jayawijaya. Analisis Varian Belanja diukur dengan melihat selisih antara pemanfaatan belanja secara realisasi dengan belanja yang dianggarkan. Semakin kecil selisih antara anggaran dan realisasi belanja maka Pemerintah Kabupaten Jayawijaya telah memanfaatkan APBD khususnya Belanja Daerah dengan baik.

Tabel 14
Varians Belanja Daerah Kabupaten Jayawijaya
Tahun 2010 - 2014

Tahun Anggaran	Belanja		
	Anggaran Belanja	Realisasi Belanja	Varians Belanja
2010	657.025.555.829	618.775.520.677	38.250.035.152
2011	759.583.804.386	728.794.684.703	30.789.119.683
2012	738.567.678.369	686.862.642.569	51.705.035.800
2013	1.048.936.074.075	954.558.203.785	94.377.870.290
2014	1.064.481.116.328	964.538.017.453	99.943.098.875

Sumber : Realisasi APBD Kabupaten Jayawijaya: Data Diolah, 2015

Dari tabel perhitungan tersebut di atas dapat diketahui bahwa selama tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 Varian Belanja menunjukkan angka yang cukup baik, dengan selisih/varian yang mendekati sama dari tahun ke tahun. Hal ini berarti bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Jayawijaya telah memanfaatkan anggaran belanja dengan baik dimana realisasi pemanfaatan belanja yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Jayawijaya lebih kecil dari anggaran yang telah direncanakan. Dengan demikian dapat dikatakan dilihat dari Analisis Varian Belanja Pemerintah Kabupaten Jayawijaya telah memanfaatkan APBD dengan baik.

Analisis Pertumbuhan Belanja

Pertumbuhan belanja daerah Kabupaten Jayawijaya selama tahun 2010-2014 cenderung mengalami peningkatan. Pada tahun 2010 terjadi pertumbuhan belanja daerah sebesar 7,28%. Kemudian psds tahun 2011 pertumbuhan belanja Daerah Kabupaten Jayawijaya kembali mengalami penurunan sebesar 6,86% daritahun sebelumnya. Pada tahun ini, kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Jayawijaya kurang baik, Karen dalam merealisasikan anggaran belanjanya telah melebihi atau melampau anggaran belanja yang direncanakan. Pada tahun selanjutnya yaitu 2013-2014 terjadi kenaikan kembali pertumbuhan belanja daerah pada tahun 2013 dengan persentase 9,54% dan pada tahun 2014 dengan persentase pertumbuhan 9,64 dari tahun sebelumnya. Dengan demikian, kinerja anggaran belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Jayawijaya dilihat dari tren rata-rata pertumbuhan dikatakan baik, karena dalam merealisasikan anggaran belanja daerah lebih rendah dari yang dianggarkan.

Tabel 15
Pertumbuhan Belanja Tahun 2010 – 2014

Tahun	Belanja Daerah (RP)	Tingkat Pertumbuhan (%)
2010	618.775.520.677	-
2011	728.794.684.703	7.28 %
2012	686.862.642.569	6.86 %
2013	954.558.203.785	9.54 %
2014	964.538.017.453	9.64 %
Rata Rata		8.33 %

Sumber : Realisasi APBD Kabupaten Jayawijaya: Data Diolah, 2015

4. Analisis Keserasian Belanja

Rasio Aktivitas/ Keserasian

Analisis keserasian pada belanja bermanfaat untuk mengetahui keseimbangan antar belanja. Rasio keserasian ini melihat keserasian antara Rasio Belanja Tidak Langsung dan Rasio Belanja Langsung. Rasio ini menggambarkan bagaimana pemerintah daerah

memprioritaskan alokasi dananya pada belanja tidak langsung dan belanja langsung secara optimal. Semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan untuk belanja tidak langsung berarti persentase belanja langsung yang digunakan untuk menyediakan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil. Perhatikan Tabel 16 dan 17 berikut ini.

Dari tabel 16, tren pergerakan Belanja Tidak Langsung dan belanja Langsung Pemerintah Kabupaten Jayawijaya tahun 2010-2014 terus mengalami kenaikan, baik Belanja Tidak Langsung maupun Belanja Langsung.

Table 16
Realisasi Belanja Tidak Langsung Dan Belanja Langsung
Kabupaten Jayawijaya Tahun 2010 – 2014

Belanja Tidak Langsung	2010	2011	2012	2013	2014
a. Belanja Pegawai	180.509.729.688	238.075.384.996	316.850.477.303,00	325.377.682.032	326.292.430.528
b. Belanja Bunga	655,200,000	0	0	395,322,000	-
c. Belanja Subsidi	-	1,500,000,000	13.602.080.000.00	15.396.194.513	10.604.400.000
d. Belanja Hibah	41.580.337.821	39,408,182,400	38.126.787.411,00	103,112,445,873	83,885,138,000
e. Belanja Bantuan Sosial	26,789,782,349	41,077,044,547	21.370.750.000.00	2,637,500,000	2,394,400,000
f. Belanja Bagi Hasil	-	-	-	-	-
g. Belanja Keuangan	10,054,650,000	22,120,800,000	7.210.000.000.00	53,790,250,000	42.620.000.000
h. Belanja Tidak Terduga	11,542,868,000	4,158,946,000	3.010.000.000.00	157,480,605	2,999,999,442
Jumlah Belanja Tidak Langsung	271,132,567,858	346,340,357,943	400,170,094,714	500,866,875,023	468,796,367,970
Belanja Langsung					
a. Belanja Pegawai	-	-	-	-	-
b. Belanja Barang dan Jasa	92.138.431.294	113.707.185.641	101.331.585.568,00	141.340.842.371	201.765.811.877
c. Belanja Modal/Pembangunan	257.833.471.525	268.747.105.119	185.360.962.287,67	312.352.486.391	293.930.004.267
Jumlah Belanja Langsung	349,971,902,819	382,454,290,760	286,692,547,855,67	453,693,328,762	495,695,816,144

Sumber : Realisasi APBD Kabupaten Jayawijaya: Data Diolah, 2015

Pada sisi Belanja Tidak Langsung, dimana terjadi penurunan belanja yaitu pada tahun 2014 dari tahun-tahun sebelumnya dengan persentase terendah yaitu 48,60% dibanding empat tahun sebelumnya.

Tabel 17
Rasio Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Terhadap Total Belanja Daerah Kabupaten Jayawijaya Tahun 2010 – 2014

Tahun Anggaran	Uraian			Rasio	
	Belanja Tidak Langsung	Belanja Langsung	Total Belanja Daerah	BTL	BL
2010	271,132,567,858	349,971,902,819	618,775,520,677	43,81%	56,55%
2011	346,340,357,943	382,454,290,760	728,794,684,703	47,52%	52,47%
2012	400,170,094,714	286,692,547,855	686,862,642,570	58,26%	41,73%
2013	500,866,875,023	453,693,328,762	954,558,203,785	52,47%	47,52%
2014	468,796,367,970	495,695,816,144	964,538,017,453	48,60%	51,39%
Rata - Rata				50,13%	49,93%

Sumber : Realisasi APBD Kabupaten Jayawijaya: Data Diolah, 2015

Kemudian pada sisi belanja langsung terjadi kenaikan pada tahun 2010 dengan persentase dan tahun 2011 dengan persentase, selanjutnya kembali terjadi penurunan pada tahun 2012 dengan persentase 41,73% dan tahun 2013 dengan persentase 47,52% dari dua tahun sebelumnya.

Dari rasio antara Belanja Tidak Langsung dan belanja langsung Pemerintah Kabupaten Jayawijaya tahun 2010-2014, dari total anggaran belanja daerah lebih besar dialokasikan untuk Belanja Tidak Langsung atau Belanja Operasional seperti Belanja Pegawai, Belanja Bunga, Belanja Subsidi Belanja Hibah, Belanja Bantuan Social, Belanja Bagi Hasil, Belanja Keuangan dan Belanja Tidak Terduga dengan persentase 50,13% dari pada Belanja Langsung dengan persentase 49,93%. Angka pada Belanja Tidak Langsung ini meningkat kerana selama lima tahun tren pertumbuhan Belanja Pegawai masih mendominasi pos-pos dalam anggaran Belanja Tidak Langsung tersebut, sedangkan pada belanja langsung didominasi oleh belanja pembangunan atau belanja pembangunan.

Jumlah ini jauh lebih besar dari persentase yang digunakan untuk anggaran Belanja Modal yang hanya rata-rata 33,74 % dari total belanja

daerah Kabupaten Jayawijaya. tersebut digunakan untuk: belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja bangunan dan gedung, belanja jalan, irigasi dan jaringan, serta belanja aset tetap lainnya. Dalam rencana maupun realisasi belanja daerahnya lebih besar porsi pada belanja Tidak Langsung sedangkan untuk penopang pelayanan publik dan penopang ekonomi, seperti infrastruktur, irigasi dan aset lainnya yang termasuk belanja modal masih rendah.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kabupaten Jayawijaya berdasarkan kriteria penilaian kinerja keserasian belanja yang dikeluarkan oleh Tim Litbang Depdagri–Fisipol UGM, 1991 dikatakan “**Cukup Serasi**” dari rata-rata belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung dengan persentase rata-ratanya 50,13 % dan 49,93 %.

Analisis Efektivitas Belanja

Dilihat dari persentase hasil perhitungan rasio ini, pemerintah Kabupaten Jayawijaya telah efektif dalam merealisasikan anggaran belanjanya, karena terlihat kesemua persentase rata-rata 92,94% dari tahun 2010-2014. Tingkat efektivitas anggaran terendah terjadi pada tahun 2013 dan 2014, hal tersebut dikarenakan pengeluaran biaya Pemerintah Kabupaten Jayawijaya untuk belanja pada tahun 2010-2011 mendekati angka yang dianggarkan.

Pemerintah daerah Kabupaten Jayawijaya telah melakukan efektivitas belanja, hal ini terlihat dari total rata-rata belanja daerahnya selama tahun 2010-2014 hampir mendekati angka 1 atau 100% atau dengan kata lain penyerapan/ daya serap anggaran belanja selama periode tersebut sudah berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Hal ini menunjukkan kinerja efektivitas belanja daerah dikatakan cukup efektif.

Tabel 17
Efektivitas Belanja Daerah Kabupaten Jayawijaya
Tahun 2010 – 2014

Tahun	Anggaran Belanja	Realisasi Belanja	Rasio Efektivitas (%)
2010	657.025.555.829	618.775.520.677	94,17 %
2011	759.583.804.386	728.794.648.703	95,94 %
2012	738.567.678.369	686.862.642.569	92,99 %
2013	1.048.936.074.075	954.558.203.785	91,00 %
2014	1.064.481.116.328	964.538.017.453	90,61 %
Rata - Rata			92,94 %

Sumber : Realisasi APBD Kabupaten Jayawijaya: Data Diolah, 2015

Dengan demikian, dari tabel perhitungan diatas terlihat bahwa berdasarkan criteria penilaian kinerja efektivitas yang ditetapkan Tim Litbang Depdagri-Fisipol UGM, maka kinerja efektivitas belanja daerah Pemerintah Kabupaten Jayawijaya dikategorikan **“Efektif”** yang dibuktikan dengan rasio efektivitas pada tahun 2010 – 2014 dengan persentase rata-rata 92,94%

Namun pengeluaran belanja pada setiap pemerintah daerah juga mesti dilihat tergantung dengan dinaminasi kegiatan pembangunan dan besarnya kebutuhan investasi yang diperlukan untuk mencapai pertumbuhan yang ditargetkan. Sebuah pemda dikatakan telah melakukan efektifitas, maka perlu dipertimbangkan juga apa-apa saja yang menjadi penyebab ataupun menjadi dampak apabila terjadi kenaikan dan juga penurunan pada belanja daerah. Pemda tidak dapat terlalu hemat, hanya kerana total belanjanya sudah membengkak, kemudian pada tahun berikutnya menurunkan belanjanya tetapi tidak mempertimbangkan apa-apa yang di butuhkan sebagai kebutuhan primer bagi pembangunan untuk mengembangkan daerah tersebut.

Analisis Overlay Belanja

Analisis ini digunakan untuk mengkomparasi dan mengukur skor kinerja berdasarkan rasio-rasio belanja yang telah diukur sebelumnya. Skor ditetapkan berdasarkan penjumlahan tanda (+) dan (-) dari masing-masing indikator rasio yang telah diukur dahulu. Jika skor kinerja bertanda (+) berarti kinerja belanja dikatakan baik. Sebaliknya jika skor kinerja bertanda (-) dapat dikatakan kinerja Belanja tidak baik.

Tabel 18
Analisis Kinerja Belanja Kabupaten Jayawijaya Tahun 2010 – 2014
Berdasarkan Analisis Overlay

Uraian						
Tahun Anggaran	Analisis Varians	Analisis Pertumbuhan	Analisis Keserasian	Analisis Efektivitas	Skor	Kriteria Kinerja
2010	+		+	+	3	Baik
2011	+	+	+	+	4	Baik
2012	+	+	-	+	2	Baik
2013	+	+	-	+	2	Baik
2014	+	+	-	+	2	Baik

Sumber : Data Diolah, 2015

Dari analisis tabel diatas, sepanjang periode 2010-2014 berdasarkan analisis overlay, terindikasi bahwa kinerja anggaran belanja daerah Kabupaten Jayawijaya selama periode tersebut termasuk dalam kategori “**baik**”. Hasil penelitian ini tidak sama dengan atau dengan kata lain menolak hipotesis sementara sebelumnya yang menyatakan kinerja belanja daerah Kabupaten Jayawijaya termasuk dalam kategori cukup baik.

Kondisi atau hal tersebut ditunjang oleh pertumbuhan belanja daerah Kabupaten Jayawijaya yang selalu meningkat dan efektivitas belanja yang selalu masuk dalam kategori efektif.

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan maka ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Kinerja Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Jayawijaya selama tahun anggaran 2010 – 2014 dilihat dari analisis Overlay di kategorikan “Tidak Baik”. Hal ini dibuktikan dengan hasil analisis overlay secara agregat yang ditunjukkan dengan adanya tingkat kemandirian keuangan daerah yang dinilai sangat kurang, tingkat ketergantungan keuangan daerah yang sangat tinggi pada dana pusat (transfer) serta derajat desentralisasi fiskal daerah yang dikategorikan sangat kurang yang walaupun dilihat dari analisis varian anggaran dan tren pertumbuhan pendapatan dapat dinyatakan cukup baik.
- b. Kinerja Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Jayawijaya Selama tahun anggaran 2010 – 2014 dilihat dari Analisis Overlay di kategorikan “Baik”. Hali ini ditunjang atau dibuktikan dengan hasil analisis terhadap beberapa rasio belanja seperti varians belanja daerah yang dinilai baik, pertumbuhan belanja daerah yang dikategorikan baik dan keserasian antara belanja langsung dan belanja tidak langsung yang dinyatakan cukup serasi serta kinerja efektivitas pelaksanaan belanja daerah yang dikatergorikan efektif.

2. Saran

Berdasarkan kesimpulan dalam kajian ini, maka saran atau rekomendasi sebagai berikut:

- a. Pemerintah Daerah Kabupaten Jayawijaya perlu lebih giat atau berupaya lagi untuk dapat meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui intensifikasi dan ekstensifikasi potensi-potensi atau sumber-sumber yang sudah ada maupun menggali potensi-potensi/sumber-sumber yang baru dalam rangka upaya

peningkatan kemandirian fiskal daerah, mengurangi tingkat ketergantungan serta meningkatkan desentralisasi fiskal pemerintah daerah;

- b. Pemerintah Kabupaten Jayawijaya perlu meningkatkan prestasi dengan upaya peningkatan kinerja dalam pelaksanaan anggaran belanja daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Perlu meningkatkan pendidikan dan latihan dalam rangka peningkatan kapasitas dan profesionalitas aparatur dalam bidang pengelolaan keuangan atau anggaran daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhim, Mohammad, 2008. Analisis Kinerja Anggaran Pemerintah dan Kaitannya dengan Perekonomian Daerah di Kabupaten Sarolangun (Thesis S2). Universitas Negeri Jambi.
- Bastian, Indra, 2006. Akuntansi Sektor Publik : Suatu Pengantar . Erlangga, Jakarta.
- Erlina, Sri Mulyadi, 2007. Metode Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen . USU Press, Medan.
- Halim, Abdul, 2004. Akuntansi Keuangan Daerah, Edisi Revisi, Salemba Empat, Jakarta
- Mahmudi, 2007. Manajemen kinerja Sektor Publik. UUP STIM YKPN, Yogyakarta
- Mardiasmo, 2005. Akuntansi Sektor Publik Andi. Yogyakarta.
- Marizka, Addina. 2009. Analisis Kinerja Pengelolaan anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Medan (Skripsi S1). Universitas Sumatera Utara.
- Nordiawan, Dedi, 2006. Akuntansi Sektor Publik, Salemba Empat, Jakarta.
- Rosalina, Eka. 2008. Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Studi Kasus di Provinsi Sumatra Barat. (Thesis S2). Universitas Gadjah Mada.

Sugiyono, S., L.T. Agus, dan Hariyandi. 2005. Penanggaran Sector Public, Pedoman Praktis, Penyusunan, Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban APBD (Berbasis Kinerja).

Republic Indonesia, Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tenang Keuangan Negara.

Badan Litbang Depdagri RI dan Fisipol UGM,1991, Pengukuran Kemampuan Keuangan Daerah Tingkat II Dalam Rangka Otonomi Daerah Yang Nyata dan Bertanggung Jawab, Jakarta